

**SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 22 TAHUN 2020  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN WORK FROM HOME (WFH) BAGI HAKIM KONSTITUSI, DEWAN ETIK, PEJABAT STRUKTURAL, FUNGSIONAL, TENAGA PERBANTUAN TNI/POLRI, PPNPN, DAN TENAGA MANCADAYA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

YM/Yth:

1. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Konstitusi MKRI;
2. Ketua dan Anggota Dewan Etik MKRI;
3. Pejabat Struktural dan Fungsional;
4. Seluruh PNS, Tenaga Perbantuan TNI/Polri, PPNPN, dan Tenaga Mancadaya MKRI.

di lingkungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19), dengan tetap memperhatikan dan memastikan layanan Mahkamah Konstitusi kepada masyarakat pencari keadilan tetap berjalan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pelayanan Mahkamah Konstitusi tetap berjalan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui laman [mkri.id](http://mkri.id) dan tetap diproses oleh pegawai yang bertugas secara elektronik. Seluruh layanan publik Mahkamah Konstitusi dilakukan secara online atau media elektronik lainnya;
2. Setiap unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi agar menghentikan sementara kegiatan di kantor dan bekerja dari rumah (work from home/WFH) mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020 atau sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut;
3. Para Pejabat Negara (YM. Ketua, YM. Wakil Ketua dan Para YM. Hakim Konstitusi), serta Ketua dan Anggota Dewan Etik diharapkan dapat bekerja dari rumah;
4. Seluruh Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi wajib bekerja dari rumah secara penuh (Fully Work From Home) dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pejabat/pegawai yang bersangkutan mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi (Eselon I dan II), Pejabat Administrator (Eselon III), Pejabat Pengawas (Eselon IV), Pejabat Fungsional dan Pelaksana, sedang Tenaga Perbantuan TNI/POLRI, PPNPN dan Tenaga Mancadaya menyesuaikan, kecuali pejabat/pegawai tugas piket (sesuai jadwal piket) dan dalam kapasitas sebagai Satgas Covid-19 Mahkamah Konstitusi. Apabila dikarenakan alasan penting diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, maka Sekretaris Jenderal sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor dengan tetap mengutamakan upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan yang berlaku di Mahkamah Konstitusi;
5. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan sesuai dengan masa berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta atau ditentukan lain oleh Mahkamah Konstitusi;
6. Selama masa WFH, Pegawai diharapkan memanfaatkan sarana kerja berbasis ICT, termasuk mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi

dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi Peduli Lindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan COVID-19, pada smartphone masing-masing. Aplikasi PeduliLindungi dapat diunduh melalui Playstore untuk versi Android dan Appstore untuk versi iOS. Pegawai agar mengajak keluarganya dan masyarakat sekitarnya untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi dimaksud;

7. Pegawai yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/kediaman (work from home), harus berada dalam tempat tinggalnya masing-masing, kecuali dalam keadaan mendesak, misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, keselamatan, dan/atau penugasan khusus yang tidak dapat ditunda.
8. Pegawai yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (work from home) secara penuh, wajib:
  - a) Melakukan absensi online pada apps.mkri.id mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB untuk pagi hari dan mulai pukul 16.00 WIB untuk sore hari, terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020;
  - b) Mengerjakan tugas dinas, dan melaporkan kepada atasan langsung pelaksanaan tugasnya setiap hari melalui SIKD, atau aplikasi kantor lainnya;
  - c) Melaporkan kondisi kesehatan secara berkala dan bila membutuhkan bantuan medis kepada Satgas Covid-19 MKRI dengan menghubungi nomor hotline 021-23529000 (ext. 18285) atau 08139427776/085891930875;
9. Seluruh Pimpinan Unit Kerja wajib memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan efektif, terkendali dan terkoordinir dengan baik, serta memonitor dan mengawasi kinerja seluruh pegawai di unit kerja masing-masing;
10. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020 atau sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut.
11. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020, Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2020, Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Work From Home (WFH) Bagi Hakim Konstitusi, Dewan Etik, Pejabat Struktural, Fungsional, Tenaga Perbantuan TNI/POLRI, PPNPN, dan Tenaga Mancadaya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 21 April 2020  
SEKRETARIS JENDERAL,  
Ttd.  
M. GUNTUR HAMZAH